

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Sudrajad, *Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara*, Jakarta: Oktober 2022, hlm. 61.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafi ndo, 2016), hlm. 60.

Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT. Elex Media Kamputindo, Jakarta, 2015.

Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Badan Uruogistik*, (Jakarta: 1984) hlm. 1155.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Arruz Media)2012, hlm.

Baqir Al-Sharr Muhammad, *Buku Induk Ekonomi*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Disertasi*, Fakultas Hukum UB, Malang, 2011, hlm. 137. Lihat

juga Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary: Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 2 dan 282.

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, hlm. 38.

Dani Elpah et al., *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang* (Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 53.

Dani Elpah et al., *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang* (Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 54.

David Wijaya, 2014, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Penerbit Indeks, Jakarta, hlm 15.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 74.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 2-3.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006), hlm. 12.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Pemerintah*, Bandung: Alumni 2004, hlm. 4.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.

J. Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2022,. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta, Cet. 1. Hlm.19

Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979), hlm. 38

Miftha Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.43

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2015).

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 10.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,

Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm 59

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (edisi kedua), (Sinar Grafika, Jakarta), 2018 hlm. 24

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Rineka Cipta, 1990, 168-171.

Syamsir, Aspek hukum, *Pengelolaan barang Milik Daerah*, (damara Press, Jakarta selatan), 2023. Hlm 169.

B. JURNAL/MAKALAH/TESIS

Anita Dkk, 2019. *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas*, Journal Uniba Law Review, Volume I Nomor 1.

Apriliana eka putri, 2023. *mekanisme pengawasan penggunaan mobildinas di instansi pemerintah*, Journal of LegalStudies hlm. 9

Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas*,” *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): hlm 81.

Deni Muliya Barus, Mukhlison S. Widodo, Ramai-ramai Memanfaatkan Fasilitas Negara http://www.gatra.com/2010-10-09/versi_cetak.php?id=141917, terakhir kali diakses tanggal 12 oktober 2018.

Fahrozi, *Sanksi Hukum terhadap Maladministrasi dalam tindak pidana korupsi*, (Tesis: Fakultas Hukum Unair Surabaya), 2016.

Fikri, *Penerapan sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar Disiplin*,
(Tesis: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi), 2024. Hlm
27.

I Gusti Nugrah Bagus Maha Iswara et al., “*Kepastian Hukum Pengenaan Pajak
Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.*” *Jurnal Hukum
Prasada* 6, no. 1 (2019): hlm 49.

Junimart Girsang et al., “*Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain
Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia*”
University of Bengkulu Law Journal 6, no. 1 (2021): 75.

May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari
Ujianti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta
Kerja,*” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 480.

M. Iqbal Aulia Nur, “*Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaa
Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian Dikota Banda Aceh)*”,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 3, no. 3 (2019): hlm 445-
446.

Rifki, *Pengawasan Aset daerah (studi Kasus Di Setda Kabupaten Batanghari)*,
(tesis :Universitas Islam Negeri) 2020, Hlm. 53.

Roy Sanjaya, *Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana,* <http://pakhe.co.id/wp->

content/uploads/2020/12/Konstruksi-Teori-Efek-Jera-Sebagai-Parameter-Hakim-dalam-Menjatuhkan-Putusan-Pidan1.pdf

SE Armono, “*Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang*” 3 (n.d.)

Shilvirichiyanti, “*Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi,*” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018):hlm. 143–144.

Yuki Muhamad Firdaus, Rezanda Yosa Avianto, Muhammad Amin Zain, Tinjauan Aspek Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak dengan hormat atas aparatur sipil Negara (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 2024, Hlm. 5

Yulius, "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014)." *Jurnal dan Peradilan Volume 4 Nomor 3 (Nopember 2015)*, hlm. 377.

Zul Akrial, Mobil Dinas dan Tindak Pidana Korupsi, dikutip dari <http://zakie1205.staff.uui.ac.id/2008/10/23/mobil-dinas-dan-tindak-pidana-korupsi/>, terakhir diakses 22 oktober 2018

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menekankan akuntabilitas penggunaan barang milik negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Undang – undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 50/PMK.06/2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016, Pasal 6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 mengatur tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PerBKN 6/2022).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), *kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan*.

D. Website

<https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 16 September 2024.

https://diklatlpkn.id/2024/09/26/kedudukan-sanksi-administratif-dalam-hukum/?utm_source.com

<https://jambi.sigapnews.co.id/news/sn-80537/sejumlah-mobil-dinas-dan-bmn-raib-plt-rektor-dan-wr-ii-bungkam#> di akses pada tanggal 25 desember 2024, pukul 20.50 wib

<https://blog.acv.astra.co.id/detail/larangan-mobil-dinas-untuk-mudik>